



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 766/IV/2013

II/APRIL 2013



RUU Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam **Disetujui Paripurna**

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id dan tvparlemen.com

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA APRIL 2013

Minggu kedua bulan April ini tetap dilaporkan berbagai kegiatan Komisi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, anggaran, legislasi dan diplomasi parlemen.

Berikut beberapa poin kegiatan minggu kedua April 2013.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Kegiatan Bidang Legislasi

Telah diputuskan oleh Badan Musyawarah (Bamus DPR): [1] RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dijadwalkan untuk memasuki pembicaraan tingkat II pada 12 April, sebelum Pidato Penutupan. Pansus RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diharapkan dapat melakukan pembicaraan tingkat I (pengambilan keputusan di Pansus) dengan Pemerintah pada 11 April 2013. Masih ada dua materi yang *pending*, yang diharapkan dapat diselesaikan di hari-hari terakhir menjelang pengambilan keputusan, yaitu mengenai sanksi dan asas Ormas.

RUU yang disiapkan oleh Baleg dengan judul Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat, atas usul inisiatif Baleg, diagendakan tanggal 11 April untuk dijadikan RUU Inisiatif DPR. Tiga RUU yaitu RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L), RUU tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*, RUU tentang Pengesahan *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*, diagendakan untuk memasuki pembicaraan tingkat II pada tanggal 11 April.

Beberapa RUU lain telah meminta perpanjangan masa pembahasan, yaitu RUU Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang



Tenaga Kesehatan, RUU tentang Desa, RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, RUU tentang Keantariksaan, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Perindustrian, dan RUU tentang Perdagangan.

Diantara beberapa RUU tersebut, yang mengalami perpanjangan sampai sepuluh kali masa sidang, yaitu RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L), RUU tentang Pendidikan Kedokteran telah mengalami sembilan kali masa sidang; RUU tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah telah delapan kali masa sidang; dan RUU tentang Jaminan Produk Halal enam kali masa sidang. Beberapa RUU lainnya, rata-rata sudah mengalami lima kali masa sidang.

Keterlambatan penyelesaian atas RUU tersebut, antara lain, karena masih adanya kesulitan mendapatkan titik temu terutama antara DPR dan Pemerintah, yang merupakan *pending matters*. Oleh karena itu, maka tanggungjawab atas penyelesaian beberapa RUU tersebut menjadi beban bersama, antara DPR maupun Pemerintah.

Kegiatan Bidang Pengawasan

Tanggal 3 April 2013, Tim Pengawas Century mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Penyidik Mabes Polri dan Tim Jaksa Penuntut Umum. Kesimpulan dari Rapat tersebut adalah: Tim Pengawas Century; [1] mendorong



Tim Penyidik Mabes Polri dan Tim Jaksa Penuntut Umum, melakukan pemeriksaan secara mendalam untuk mengetahui motif PT. Ancora Land mengakuisisi PT. GNU, mengingat dari hasil penyidikan diketahui bahwa, PT GNU adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, namun tidak memiliki karyawan, tidak memiliki aset usaha dan tidak ada kegiatan operasional perusahaan; [2] mendorong kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap aset-aset yang telah disita, terkait kasus Bank Century yang telah berkekuatan hukum tetap untuk digunakan sebagai pengganti dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; [3] akan memanggil kembali pihak PT Ancora Land yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang PT GNU, yaitu Sdr. Veronika Lukito. Jika yang bersangkutan tidak hadir, maka Tim Pengawas akan melakukan panggil paksa sesuai mekanisme UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3.

Lain-lain

Sehubungan dengan adanya surat masuk dari BPK-RI perihal Penggantian Antar Waktu dan pemberitahuan berakhirnya masa jabatan anggota BPK-RI atas nama Dr. H. Taufiequrrahman Ruki yang akan berusia 67 tahun pada tanggal 18 Mei 2013, diputuskan oleh Bamus DPR, bahwa pemrosesannya akan ditangani oleh Komisi XI.

Surat dari Presiden-RI tertanggal 30 Maret 2013 perihal Usulan Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, diputuskan ditangani oleh Komisi XI. Menurut ketentuan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2009, termuat dalam Pasal 58A ayat (2) mengatakan bahwa: [a] Badan Supervisi terdiri dari lima orang anggota, yaitu seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan tiga tahun; [b] keanggotaan Badan Supervisi diusulkan oleh Presiden kepada DPR, sekurang-kurangnya sepuluh orang.

Oleh karenanya, Presiden telah mengusulkan kepada DPR sepuluh orang calon anggota BSBI Periode 2013-2016, untuk dipilih lima orang, dan ditangani oleh Komisi XI sesuai dengan Tata Tertib dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kegiatan BURT DPR

Agenda Badan Urusan Rumah Tangga (BURT DPR) yang dilaksanakan pada Masa Persidangan III antara lain berkaitan dengan: [1] penyusunan kriteria dan mekanisme Program Aspirasi Masyarakat DPR-RI. Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan representasi rakyat yang tertuang dalam UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Aspek penting dari program ini adalah kriteria yang perlu disepakati dalam penyusunan program aspirasi tersebut, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Daerah Pemilihan. Usulan tersebut disampaikan DPR-RI kepada Pemerintah, sesuai mekanisme dan siklus penganggaran nasional, agar dapat disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

[2] Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR-RI tahun 2014, sesuai dengan UU No 27 tahun 2009 tentang MD3 pasal 133 dan Tata Tertib pasal 86. Penelaahan DIPA DPR tahun anggaran 2013. [3] penelaahan tentang Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI). P3DI agar mempercepat layanan perpustakaan secara *online* ke seluruh Ruang Kerja DPR-RI dan menyempurnakan *document cash planing*. Topik kajian yang dilakukan P3DI harus disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang dan menjadi pembahasan di DPR-RI, dengan memperhatikan prinsip tepat waktu dan tepat guna. P3DI agar menyampaikan hasil kinerja yang dicapai pada 2013 dan rencana pencapaian target kinerja tahun 2013.

[4] Pembahasan Badan Fungsional Keahlian oleh Panja BURT DPR sudah berlangsung cukup lama, dan telah menerima masukan untuk penyempurnaan, Panja BURT didampingi oleh Tim Pendamping dari Setjen DPR-RI dan Konsorsium dari UI, ITB dan UGM. [5] Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib Peliputan Pers DPR-RI telah melalui pembahasan beberapa kali, akhirnya mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna tanggal 2 April 2013. [6] BURT telah melakukan *workshop BURT* di Semarang dan Bali, dengan tema “Penguatan Kinerja Kelembagaan DPR-RI Melalui Peningkatan Peran, Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPR-RI”. *Workshop* menghadirkan para pakar sebagai narasumber, dan menghasilkan beberapa rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja DPR.

Diplomasi Parlemen

Pada tanggal 22-27 Maret 2013, DPR-RI telah mengirimkan delegasi ke *The 128th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings* di Quito-Ecuador yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Bidang Korinbang, Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, MM. Pada agenda *General Debate ‘From Unrelenting Growth to Purposeful Development “Buen Vivir” New Approaches, New Solutions’*, Ketua Delegasi menyampaikan kepada Sidang Umum IPU bahwa suatu alternatif metode pembangunan perlu dilakukan agar pembangunan tidak lagi semata-mata berpusat pada pertumbuhan ekonomi, namun juga menuju pada keseimbangan antara hak-hak umat manusia untuk sejahtera dengan kelestarian lingkungan. Ketua Delegasi juga menyampaikan posisi Indonesia yang mendukung diskusi global yang komprehensif dalam pembentukan rencana induk untuk Pembangunan Pasca-2015. Hal ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya yang pada saat bersamaan *Regional Consultation on MDGs and Post-2015 Development Agenda* di Bali.

Pada kesempatan Sidang Umum IPU di Quito kali ini, Indonesia kembali menunjukkan peran aktifnya dalam organisasi IPU dengan terpilihnya H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH. (Wakil Ketua BKSAP/ F-PAN) sebagai *President of the Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law* dan Dra. Hj. Herlini Amran (F-PKS), sebagai *Anggota Committee on Middle East Question*.*

RUU Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam Disetujui Paripurna



Wakil Ketua DPR Pramono Anung berjabat tangan dengan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya selesai DPR menyetujui RUU Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam.

Paripurna DPR RI menyetujui RUU protokol Nagoya dan RUU Konvensi Rotterdam. Demikian salah satu kesepakatan Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (11/4). Selain kedua RUU tersebut, Paripurna juga membahas laporan Badan Kehormatan DPR RI mengenai perkara etik Badan Kehormatan RI, dan pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat menjadi RUU DPR RI.

“Pengesahan RUU protokol Nagoya didasari bahwa Indonesia memiliki sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional karena itu perlu dijaga kelestariannya sebagai sumber daya pembangunan untuk kemakmuran rakyat, serta keuntungan yang adil dan seimbang bagi sumber daya genetik,” kata Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Sutan mengatakan, RUU Protokol Nagoya memberikan perlindungan terhadap Sumber Daya Genetik dan pengetahuan tradisional, selain itu, melalui RUU tersebut diharapkan dapat mencegah pencurian yang tidak sah terhadap keanekaragaman hayati. “RUU ini juga meletakkan dasar hukum bagi keanekaragaman hayati, karena itu dipandang perlu untuk mengesahkan protokol Nagoya,” paparnya.

Menurut Sutan, pengesahan RUU Konvensi Rotterdam didasari semakin meningkatnya perdagangan bahan kimia antar berbagai negara. Ini semua dapat menimbulkan kekhawatiran khususnya penyebaran bahan berbahaya B3 karena negara berkembang seperti Indonesia sangat rentan karena adanya keterbatasan infrastruktur dan keamanan terkait limbah B3 tersebut.

“Perdagangan tersebut jumlahnya sangat besar dan masih sulit dikendalikan untuk itu, ratifikasi RUU Rotterdam menjadi tanggung jawab bersama terkait perdagangan bahan berbahaya tertentu,” ujarnya.

melalui RUU Konvensi Rotterdam, lanjut Sutan, memiliki manfaat bagi Indonesia dian-

taranya dapat meningkatkan kerjasama dan pendanaan terkait teknologi dan infrastruktur, kemudian menggali dukungan kalangan internasional guna mencegah bahan kimia berbahaya bersama.

Sutan menjelaskan, fraksi PKS meminta perpanjangan waktu terkait RUU Protokol Nagoya. "Alasan mereka bahwa

Indonesia belum memiliki pemetaan yang lengkap terkait keanekaragaman sumber hayati nasional, dan post pemeriksaan yang efektif dalam memantau sumber hayati," tambahnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi IX DPR Bentuk Panja *Outsourcing*



Anggota Komisi IX, Endang Agustini Syarwan Hamid (F-PG).

Komisi IX DPR RI akan membentuk Panitia Kerja *Outsourcing* untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan BUMN. Demikian kesimpulan rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, dan beberapa Dirut BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/4)

"Panja akan mulai bekerja pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 setelah ada kesepakatan dalam rapat pleno Komisi IX," kata Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning.

Anggota Komisi IX, Endang Agustini Syarwan Hamid (F-PG), salah satu yang mengusulkan dibentuknya panja tersebut meminta ketegasan dari Meneg BUMN, berapa lama bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan pekerja di perusahaan BUMN.

Menurut Endang, diperlukan target waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan, sehingga pelayanan-

elayanan publik terutama kepada pekerja dapat dipertanggungjawabkan, dapat terintegrasi lintas kementerian, intern BUMN, dan perusahaan swasta yang terlibat didalamnya.

"Saya mengusulkan kepada Pimpinan Komisi IX, untuk menyelesaikan PR besar ini kalau waktunya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kami mengusulkan Komisi IX segera membuat Panja spesial untuk menyelesaikan persoalan pekerja di BUMN dan persoalan lain yang mengikutinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," tegas Endang.

Endang menyatakan, regulasi atau apapun namanya adalah buatan manusia tidak ada alasan untuk tidak fleksibel dalam mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Endang juga meminta, agar Kemenakertrans dan Keme-BUMN membentuk koordinasi lintas kementerian.

Dalam rapat kerja tersebut, Endang juga mempertanyakan paparan yang disampaikan Meneg BUMN, apakah sudah mendapatkan masukan dan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan BUMN.



Menteri Nakertrans Muhaimin Iskandar dan Menteri BUMN Dahlan Iskan serta jajarannya raker dengan Komisi IX DPR.

Akhirnya Hadir

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), Dahlan Iskan, akhirnya menghadiri Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Rabu (10/4) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Sebuah perjuangan yang panjang dan luar biasa, untuk menghadirkan Menteri BUMN tidak gampang, membutuhkan waktu, padahal ada lagu jangan sampai tiga kali,” kata Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning yang memimpin rapat tersebut.

Menurut Ribka, Komisi IX DPR RI sampai tiga kali mengundang, bahkan melalui pimpinan DPR RI melayangkan surat kepada Presiden, dan Presiden menginstruksikan Meneg BUMN untuk hadir di Komisi IX. Ribka mengucapkan terima kasih atas kehadiran Meneg BUMN tersebut.

Ribka bersyukur atas kehadiran Meneg BUMN dalam Raker tersebut. Walaupun dirinya pernah sampai mendatangi kediaman Meneg BUMN namun tidak bisa ketemu.

“Saya sampe naik ojek, jadi bukan saudara menteri saja naik ojek, tapi akhirnya lolos juga tidak ketemu. Karena

pengennya saya ketemu menteri BUMN ini untuk menyelesaikan persoalan buruh BUMN. Karena hati saya miris, ketika ada salah satu korban *outsourcing* salah satu buruh BUMN ketika memeluk kaki saya dia katakan, ibu isteri saya sudah jadi pelacur dan anak saya gantung diri karena tidak bisa sekolah.” papar Ribka.

Ribka menilai, Meneg BUMN dikenal baik di media maupun di publik dengan citra yang sangat baik yang sangat peduli dengan rakyat. Oleh karenanya, Ribka mengharapkan pada pagi hari ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat yang tertindas yaitu kaum buruh.

“Bagaimana persoalan-persoalan pekerja yang lain di perusahaan swasta, kalau persoalan-persoalan BUMN perusahaan negara tidak menjadi contoh buat perusahaan-perusahaan yang lain,” imbu Ribka.

Sebelumnya, Meneg BUMN Dahlan Iskan sempat tiga kali tidak menghadiri undangan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI untuk menyelesaikan masalah persoalan buruh di BUMN. (sc)/foto:iwan armanias, ry/parle.

Baleg Tunda Pengambilan Keputusan Revisi UU Pilpres

Badan legislasi (Baleg) DPR RI menunda pengambilan keputusan tentang revisi UU Pemilihan Presiden (Pilpres) hingga masa persidangan berikutnya pada Mei mendatang.

Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam rapat Baleg pada Rabu (10/4) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Achmad Dimiyati Natakusumah. Salah satu yang menjadi dasar ditundanya keputusan tentang revisi UU Pilpres adalah



Anggota Baleg Ahmad Yani (FPP) dan Indra (FPKS).

karena belum adanya kesepakatan dari semua kelompok fraksi (poksi).

Dua fraksi di DPR yaitu FPPP dan FPKS menginginkan adanya revisi dari Undang-undang tersebut dan delapan fraksi tidak ingin adanya revisi dari UU No. 42 tahun 2008 tersebut. Terutama perihal besaran *Presidential threshold*

(PT) atau ambang batas presiden yang sebesar 20 persen untuk suara dewan. Mereka menganggap besaran tersebut menyulitkan pencalonan.

“Sebenarnya dari Fraksi Gerinda juga ingin adanya perubahan dalam UU Pilpres ini, tapi mengenai besaran yang Gerinda inginkan tidak sama dengan yang diajukan FPKS dan FPPP yaitu sebesar 3,5 persen kursi (suara DPR) dan 4 persen suara sah nasional atau masyarakat,” jelas anggota Baleg dari Fraksi Gerinda, Martin Hutabarat.

Martin menambahkan jika besaran PT dalam UU Pilpres yang ada masih diberlakukan maka hal itu membatasi potensi munculnya kandidat atau capres-capres terbaik bangsa yang notabene bukan dari kalangan pengurus partai. Martin tidak ingin capres mendatang hanya dimiliki oleh elit partai saja. Sementara jika melihat angka yang diusulkan FPPP menurut Martin hal tersebut sangat rendah atau kecil. Sedangkan Ahmad Yani dari Fraksi PPP berharap pasca reses masyarakat akan terus mendukungnya untuk mengajukan usulan tentang PT yang sebesar 3,5 persen bahkan jika bisa dihilangkan sama sekali.

Dengan adanya *dead lock* dalam rapat pleno tersebut maka atas persetujuan



Martin Hutabarat saat menyampaikan pendapatnya.

anggota rapat lainnya, Dimiyati sebagai wakil ketua Baleg sekaligus pemimpin rapat menunda pengambilan keputusan revisi UU Pilpres.

“Meskipun sudah ada kesepakatan akan pembatasan rangkap jabatan atas Presiden dan Wakil Presiden, namun rapat pleno baleg kali ini belum menemui kesepakatan atas besaran PT (*Presidential Threshold*). Oleh karena itu revisi UU no. 42 tahun 2008 tentang Pilpres dan Pilwapres ditunda untuk dilakukan pendalaman kembali oleh Panja RUU Pilpres,” jelas Dimiyati sesaat sebelum menutup rapat. (Ayu) foto: ry/parle

Komisi IV Setujui Program Prioritas Kementan Percepatan Pembangunan Madura



Ketua Komisi IV Romahurmuzy.

Komisi IV DPR RI menyetujui usulan pemanfaatan anggaran sebesar Rp.99,703 Milyar, sebagai program kegiatan prioritas Pemerintah pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013. Alokasi ini untuk 2 kegiatan prioritas Kementerian Pertanian dalam rangka percepatan pembangunan di Madura Tahun 2013.

“Pengembangan sapi dan Kambing Rp.10,203 Milyar

yaitu Kabupaten Bangkalan Rp.4,383 Milyar dan Kabupaten Sampang Rp.5,820 Milyar, serta pengembangan tebu lahan kering seluas 4.000 Ha sebesar Rp.89,5 Milyar yaitu Kabupaten Bangkalan 2.500 Ha senilai Rp.55,091 Milyar dan Kabupaten Sampang 1.500 Ha senilai Rp.34,343 Milyar,” jelas Ketua Komisi IV Romahurmuzy, dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/4).

Patut diketahui, sesuai dengan Rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang APBN TA 2013, terdapat antara lain 2 program kegiatan prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan, yaitu pembangunan shelter penanganan bencana dengan alokasi Rp.1 Triliun dan Program percepatan pembangunan Madura dengan alokasi Rp.760,7 Milyar.

“Program tersebut direncanakan akan dilaksanakan oleh beberapa Kementerian atau Lembaga, untuk Kementerian Pertanian pada program percepatan pembangunan Madura mendapat anggaran sebesar Rp.99,703 Milyar,” tegas Romahurmuzy. (as) foto :wahyu/parle

Rapat Timwas Century Ditunda Lantaran Pejabat BI Tak Hadir



Rapat Tim Pengawas (Timwas) Bank Century dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang sedianya menghadirkan pejabat Bank Indonesia, mantan Direksi dan Komisaris Bank Century dan Buntario Tigris Darmawan (Notaris yang membuat akte perjanjian antara BI dan Bank Century) Rabu (10/4) di Gedung DPR, akhirnya ditunda. Pasalnya yang hadir hanya tiga orang mantan Direksi Bank Century terdiri Hamidy, Sulaiman Ahmad Basyir dan Poerwanto Kamsjadi, sedangkan pejabat BI dan Notaris Buntario juga absen.

Wakil Ketua DPR Taufik Kuriniawan membacakan surat yang ditandatangani Gubernur BI Darmin Nasution, menyebutkan bahwa pejabat BI tidak bisa menghadiri undangan Timwas

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berbincang dengan anggota Timwas Century DPR.

Century karena sedang menyiapkan rapat Dewan Gubernur, sedang Notaris Buntario berhalangan hadir karena sedang berada di luar negeri.

“Kalau pejabat BI dan notarisnya juga absen, saya khawatir kita tak bisa menelitik secara tuntas. Saya usulkan rapat ini ditunda dan dijadwal ulang memanggil kembali pejabat BI dan notaris serta penyidik KPK,” ujar Fahri.

Alasan pejabat BI yang tidak bisa hadir karena menyiapkan rapat Dewan Gubernur BI. “Ini agak aneh tigatiganya menyiapkan rapat. Serumit apa hingga tak hadir,” tandasnya.

Anggota Timwas dari FPG Nudirman Munir menilai, alasan pejabat tidak masuk akal. Alasannya dibuat-buat sehingga tidak hadir dalam rapat ini. Kalau yang hadir hanya dari Bank Century, tidak ada gunanya sehingga perlu ditunda saja. “Kalau perlu dipanggil paksa, kita tak mau dipermainkan seperti ini dengan alasan apapun. Undangan sudah dikirim sejak lama,” katanya.

Hal senada disampaikan Bambang Soesatyo, bahwa fokus rapat ini adalah

membahas penyimpangan Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (FPJP). Kalau benar Gubernur BI ketika itu –Boediono memberikan mandat atau kuasa kepada tiga orang pejabat BI untuk penandatanganan akte notaris yang hari ini dipanggil tapi mangkir, tidak bisa dicek penyimpangan tersebut. Penyimpangan yang akan diungkap, bagaimana rekayasa dokumen terjadi, sebab dalam laporan BPK terungkap penandatanganan dilakukan jam 2 pagi, namun jauh sebelumnya dana sudah dicairkan.

“Ini ada upaya menghindari dari proses yang dilakukan Timwas. Saya sependapat rapat ditunda untuk pemanggilan ulang,” tegas Bambang Soesatyo.

Sejumlah anggota Timwas, Hendrawan Supratikno, Sidarto Danusubroto, Ahmad Yani, Chandra dan Chairuman Harahap setuju jika rapat ditunda dan dijadwalkan pemanggilan ulang. Timwas juga setuju pemanggilan ulang kepada Direksi Bank Indonesia, mantan Direksi Bank Century dan Notaris Buntario Tigris Darmawan ditambah penyidik KPK dan salah satu pimpinan KPK.

Waktunya juga dipastikan bahwa pemanggilan ulang akan dilakukan pada hari Rabu Minggu kedua bulan Mei yang akan datang. Timwas juga meminta surat dikirim jauh hari supaya dipersiapkan sejak lama dan tidak ada alasan lagi untuk menolak undangan rapat Timwas.

Anggota Timwas Fahri Hamzah sebelumnya mengungkapkan, rapat-rapat Timwas mendatang akan fokus pada upaya *asset recovery* dan penelidikan aliran dana karena sampai rapat dua pekan lalu, setelah 4 tahun kasus Century berjalan, menjadi kabur. Dimana pidana intinya tidak terjamah, kemudian yang disebut pidana sampingan justru lebih banyak dibahas.

“ Karena pidana intinya tidak terjamah sehingga *asset recovery* tidak terjadi. Dari Rp 6,7 triliun ditambah FPJP yang dikururkan melalui rekening BI dan LPS sampai dua pekan lalu belum ada serupiahpun laporan pengembalian aset, diluar harga saham Bank Mutiara yang tidak diketahui nilainya,” kata Fahri menambahkan. (mp) Foto :wahyu/parle.

Ekuador Tawarkan Kerjasama Migas di Indonesia



Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima Dubes Ekuador Eduardo Calderon.

Ekuador menawarkan kerjasama di sektor Migas kepada Indonesia. Hal itu mengemuka saat Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima Dubes Ekuador Eduardo Calderon, di Gedung Nusantara III DPR RI, Rabu (10/4).

“Ekuador masih menawarkan kerjasama di bidang perminyakan, apalagi dulu Pertamina pernah mengelola blok disana,” paparnya.

lebih lanjut Pramono mengatakan, Ekuador juga sempat mengajukan rencana Pembelian pesawat CN 235 kepada Indonesia. “Mereka juga tertarik untuk membeli Pesawat CN 235 bahkan, mereka sejak tahun 2010 telah mengajukan namun sampai sekarang masih belum mendapatkan

kepastian dari Pemerintah,” jelasnya.

Pram menambahkan, *President of National Assembly* Ekuador direncanakan akan mengunjungi Indonesia pada tanggal 26 April-1 Mei. “Ini dalam rangka menindaklanjuti delegasi Indonesia yang berangkat di IPU mereka tertarik

berkunjung ke Indonesia bahkan mereka menganggap Indonesia memiliki posisi strategis di Asia,” ujarnya,

Saat ini, Hubungan dagang Indonesia-Ekuador saat ini terus tumbuh, dari USD 44,2 juta di tahun 2007 menjadi USD 96,6 juta pada tahun 2011, dengan

rata-rata pertumbuhan sebesar 19,8 persen pertahun. Perdagangan kedua negara diharapkan dapat terus tumbuh mengingat potensi besar yang ada pada kedua negara. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VI Gelar RDP Soal Kenaikan Bahan Pokok

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, untuk membahas kenaikan harga bahan pokok hortikultura. Rapat juga dihadiri Ketua Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komite Antidumping, dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Rabu (10/4). Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG) didampingi Wakil Ketua Aria Bima (F-PDI Perjuangan).

Kenaikan harga bahan pokok salah satunya dipengaruhi oleh sistem distribusi di pelabuhan. Perlu transparansi pada sistem distribusi barang kebutuhan pokok, agar tidak menumpuk di pelabuhan. “Sekarang ada wacana pengenaan bea masuk sistem tarif. Dan dari pembicaraan dengan para importer dari berbagai negara, mereka lebih mengapresiasi hal yang transparan tentang pengenaan tarif daripada sistem kuota,” ungkap Airlangga saat memimpin rapat.

Sebelumnya, Kemendag menerapkan sistem kuota impor terhadap produk bahan pokok yang masuk ke Indonesia. Beberapa negara sudah melayangkan komplain kepada WTO soal sistem yang diterapkan Indonesia. Perubahan sistem menjadi hal mendesak dilakukan Kemendag, agar distribusi barang tidak tersendat, apalagi kita akan segera menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri.



Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto.

Seperti diketahui, sistem kuota atas impor komoditas pangan yang selama ini diberlakukan, ternyata memberi peluang terhadap praktik jual beli dokumen pemasukan impor atau dokumen palsu. Dalam sistem kuota, ada interaksi antara importir dan pengambil kebijakan yang selalu dimanfaatkan untuk melakukan penyelewengan. Sementara dengan sistem tarif, lalu lintas barang impor yang masuk lebih terbuka dan transparan. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Desak Dirjen Perhubungan Udara Lengkapi Fasilitas Instrumen Landing System

Komisi V DPR mendesak Dirjen Perhubungan Udara untuk melengkapi penerbangan dengan instrumen *landing system* di bandara yang melayani pesawat jet. Demikian salah satu butir kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said.

“Komisi V DPR juga mengapresiasi Dirjen Perhubungan udara dalam audit universal ICAO untuk pemenuhan standar *safety penerbangan*,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said membacakan kesimpulan RDP dengan Dirjen Perhubungan Udara dan

berbagai operator maskapai nasional, Gedung Nusantara, Selasa, (9/4).

Selain itu, Komisi V DPR juga meminta Dirjen Perhubungan lebih tegas dalam menerapkan UU No. 1 tahun 2009 tentang keselamatan Penerbang-



an. “Komisi V DPR juga menegaskan kembali perlunya kordinasi kepada pemerintah daerah terkait ketinggian bangunan, peternakan, burung dan lainnya di kawasan bandara,” ujarnya.

Sementara terkait keberadaan pilot asing, lanjut Muhidin, Komisi V DPR meminta Dirjen Perhubungan udara dan maskapai nasional agar melakukan seleksi ketat terhadap pilot asing dan melibatkan asosiasi pilot dalam negeri. (si)foto:wy/parle

Pimpinan Komisi V DPR berbincang dengan Dirjen Perhubungan Udara dan berbagai Operator Maskapai Nasional.

DPR: Pemekaran Harus Sejahterakan Rakyat



Suasana rapat pembahasan dengan Dirjen Otda, DPD RI, Komite I DPD RI, dan beberapa Bupati dan DPRD terkait 7 RUU DOB.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan pemekaran sebuah daerah harus bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyat bukan semata-mata untuk kepentingan elite.

“Harus ada jaminan bahwa dengan pemekaran akan mampu mensejahterakan rakyat bukan semata untuk kepentingan elit, tapi betul-betul menjam bahwa pemekaran itu mampu

menjawab kesejahteraan rakyat,” kata Agun di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (9/4), saat memimpin rapat pembahasan dengan Dirjen Otda, DPD RI, Komite I DPD RI, dan beberapa Bupati dan DPRD terkait perkembangan tujuh Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru (RUU DOB).

Di samping itu, pemekaran juga harus merupakan aspirasi rakyat, yang

dibuktikan dengan seluruh dokumen-dokumen persyaratan para pemegang stakeholder, serta pihak eksekutif maupun legislatif. “Kami (DPR-red) juga akan mengecek kelapangan. Prinsipnya, ada surat selembarnya pun yang ditujukan ke Komisi II DPR, kami (DPR-red) akan klarifikasi. Artinya kami (DPR-red) ingin bahwa pemekaran itu betul-betul kehendak rakyat,” katanya.

Politisi dari Partai Golkar itu menambahkan sejatinya, Komisi II DPR menempatkan RUU DOB sebagai UU tentang “manusia baru” bukan seperti membuat UU konstruksi jalan atau jembatan. Jika diibaratkan kata Agun, RUU DOB ini seperti melahirkan manusia.

“Komisi II DPR tidak ingin melahirkan dengan cara operasi secar. Karena operasi secara hanya bisa dilakukan kalau sudah memang sudah hukumnya wajib disecar, karena kalau tidak akan mati didalam perut. Nah, kita ingin melahirkan RUU DOB ini secara normal. Ibarat manusia itu di dalam kandungan selama sembilan bulan

baru melahirkan, jangan baru dua bulan sudah minta dimekarkan,” ujarnya beranalogi.

Yang tidak kalah pentingnya dalam usulan pemekaran itu kata Agun adalah melihat dari sisi geo politik dan geo strategis daerah yang akan dimekarkan. “Seperti halnya daerah perbatasan kewilayahan, karena disana mungkin sudah banyak sumber daya alam yang misalnya saja ikannya diambil orang-orang asing. Itu kita lihat sebagai pertimbangan geo strategis. Pertimbangan politiknya, kalau tidak cepat-cepat dimekarkan, khawatir wilayah tersebut bisa bergabung dengan wilayah negara

tetangga, secara politik ini berbahaya karena menyangkut dengan kedaulatan,” tegasnya.

Sejauh ini, Komisi II DPR kata Agun jika memang daerah itu layak dimekarkan, DPR tidak akan mempersulitnya. “Ketika akal sehat kita mengatakan belum mungkin, ya kita tunda dulu (dimekarkan-red). Prinsipnya, kita (DPR-red) bukan menstop (pemekaran-red) tapi memberi kesempatan lagi untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang belum dilengkapi,” katanya. (nt)/
foto:wahyu/parle.

Sebagian Rekomendasi BPK Belum Ditindaklanjuti PDAM Kota Makassar

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar sudah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian sebagian rekomendasi belum dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti.

Demikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI, Yahya Sacawiria, pada saat menyampaikan kesimpulan dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PDAM Hamzah Ahmad di Ruang Rapat PDAM Jl. Dr. Ratu-lingi Makassar, Sulawesi Selatan Senin (8/4) siang.

Yahya Sacawiria yang memimpin rapat menambahkan, dengan belum diselesaikannya rekomendasi BPK, serta permasalahan di PDAM Kota Makassar yang sudah masuk ke proses hukum, maka BAKN DPR akan terus memonitor proses hukum yang sedang berlangsung.

Terkait dengan adanya permasalahan di PDAM kota Makassar dengan pihak ketiga, menurut Yahya, maka perlu



Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawiria memimpin RDP dengan Dirut PDAM Makassar Hamzah Ahmad.

dilakukan kajian komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya perlu menentukan apakah akan dilanjutkan atau menghentikan kontrak dengan pihak ketiga tersebut seperti kepada PT Traya, PT Bahana, PT Baruga dan PT Multi Engka Utama dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan menguntungkan bagi PDAM Kota Makassar.

Dalam kesempatan ini politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan, bagaimana strategi PDAM Kota Makassar dalam mengendalikan berbagai kontrak dengan pihak ketiga, agar mendapatkan kontrak yang menguntungkan. Selain itu apakah PDAM Kota Makassar sudah melakukan evaluasi kembali atas nilai investasi dan nilai jual air terkait kerja sama

dengan PT Bahana Cipta.

Menanggapi hal tersebut, Dirut PDAM Kota Makassar Hamzah Ahmad menjelaskan tentang strategi PDAM Kota Makassar yang sudah menghitung biaya pengenaan tarif air curah yang dibayarkan ke Mitra dengan memperhitungkan Pendapatan dari penjualan air curah tersebut kepada para pelanggan setiap bulannya. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan penjualan air curah masih lebih besar dari biaya air curah.

Dirut PDAM Hamzah Ahmad menambahkan, bahwa pihaknya telah membentuk tim monitoring PT Traya dan Tim

Monitoring PT. Bahana Cipta dan PT Multi Engka Utama untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kerja sama tersebut serta melakukan koordinasi tentang pelayanan an suplai air kepada pelanggan PDAM Kota Makassar.

“PDAM Kota Makassar sudah melibatkan konsultan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) untuk melakukan kajian terhadap kerja sama tersebut dan juga mengikutsertakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan. Hasil revisi sementara masih dalam proses, “ tegas Hamzah Ahmad. (Spy).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung Terima Pengaduan MPBI

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo didampingi Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning dan anggota Komisi IX Arif Minardi di Lantai III Gedung Nusantara III, Selasa (9/4), menerima sekitar delapan belas perwakilan dari tiga organisasi buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

MPBI kepada Pimpinan DPR mengadukan atas keberatan mereka berkaitan dengan kesehatan buruh atau UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). MPBI mempermasalahkan adanya dua Peraturan Presiden (Perpres) yang bertentangan dengan Undang-undang yang sebenarnya menjadi Induk dari semua peraturan pemerintah.

“Kami meminta DPR RI untuk merevisi dua Peraturan Pemerintah dan Presiden yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Pertama adalah Perpres no. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang disahkan Presiden pada 23 Januari 2013 lalu. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2012 tentang PBI,” jelas Muhammad Rusdi, Sekjen KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) di ruang rapat pimpinan DPR RI.

Dijelaskannya, kedua peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 terutama Pasal 7 tentang BPJS yang menyatakan bahwa badan hukum BPJS itu harus badan hukum publik, bukan kembali menjadi badan hukum berupa PT, BUMN, atau yayasan. Sementara dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah tidak disebutkan secara eksplisit tentang badan hukum dari BPJS Kesehatan. Dengan tidak disebutkannya secara eksplisit tentang badan hukum dari BPJS Kesehatan, dikhawatirkan akan ada interpretasi bahwa badan hukum dari BPJS Kesehatan adalah PT, yang artinya akan berorientasi pada profit semata.



Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo menerima perwakilan buruh yang tergabung dalam MPBI.

Atas tuntutan MPBI tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung Wibowo mengatakan bahwa Pimpinan DPR RI dan Komisi IX yang membawahi permasalahan ketenagakerjaan dan kesehatan akan menindaklanjuti aduan tersebut.

“Pimpinan DPR RI dan Komisi IX akan menyurati Presiden karena kami melihat memang ada sebuah pelanggaran hukum, ada 2 peraturan yang dibuat pemerintah yang bertentangan dengan Undang-undang. Karena bagaimanapun tidak boleh ada peraturan pemerintah atau presiden yang bertentangan dengan Undang-undang. Untuk itu kami akan tindaklanjuti aduan tersebut dengan segera mengirim surat ke Presiden,” ungkap Pramono.

Ditambahkan Pramono, bersama Komisi IX akan terus mengawasi masalah ini sampai ada penjelasan dan jawaban yang pasti dari pemerintah. Karena menurutnya seperti pernyataan MPBI bahwa mereka akan terus menyuarakan aspirasinya sampai tuntutan dan pengaduannya tercapai. Dan bukan tidak mungkin jumlah buruh yang turun ke jalan akan bertambah banyak. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

DPR: RUU Pertanahan Solusi Konflik Agraria



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa.

DPR optimis Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan mampu mendorong reformasi agraria. Apalagi semangat reformasi agraria sudah menjadi amanat dalam UUD 1945 yang mengamanahkan untuk mengelola Sumber Dalam Alam (SDA) untuk kemak-

Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/4).

Politisi dari Partai Golkar itu memastikan bahwa Komisi II DPR bertekad untuk secepatnya menyelesaikan RUU ini dengan harapan konflik agraria bisa

muran rakyat yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya UU Pokok Agraria 1960 dan Tap MPR/XI/2001.

“RUU Pertanahan ini diharapkan bisa menyelesaikan konflik agraria, sengketa pertanahan, diseluruh Indonesia yang sampai hari ini banyak tidak terselesaikan,” kata Ketua

terselesaikan secara komprehensif termasuk sengketa pertanahan yang masih banyak terjadi dari Sabang sampai Merauke yang sampai hari ini belum kunjung usai.

“Ternyata ketidakselesaian itu akibat arogansi dari UU yang bersifat sektoral, sehingga kadang-kadang Gubernur dan Bupati tidak bisa berbuat apa-apa, ditambah Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga sudah lepas tidak lagi dalam jangkauan kepala-kepala daerah,” ujarnya.

Sebagai bukti keseriusan Komisi II DPR dalam merampungkan RUU ini pihaknya mengaku bahwa Komisi II DPR bekerja tanpa mengenal waktu dengan harapan agar RUU ini segera rampung. “Komisi di DPR yang paling luar biasa adalah Komisi II DPR, tiada hari tanpa aktifitas, hari Jumat dan Sabtu pun kami tetap bekerja tanpa lelah, kami mengapresiasi untuk seluruh anggota Komisi II DPR atas kinerjanya dalam pembahasan RUU ini,” ujarnya. (nt) foto:wahyu/parle

RUU P2H Lindungi Hak Masyarakat Adat



Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dan Firman Subagyo.

Komisi IV DPR RI tengah menyusun draf UU yang melindungi masyarakat adat dan terpencil. Dalam RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) itu, masyarakat adat diberi kebebasan memanfaatkan hutan setempat untuk survival, sekaligus melestarikannya.

Namun, RUU ini masih mengalami penolakan dari sejumlah kalangan terutama LSM. Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi IV dengan sejumlah LSM, Senin (8/4).

Ketua Panja RUU P2H Firman Soe-

bagyo (FPG) didampingi Wakil Ketua Komis IV Herman Khaeron (FPD) menerima kehadiran sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk kelestarian hutan dan juga Komnas Ham. LSM yang hadir, yaitu Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Beberapa anggota Panja dan pejabat dari Kementerian Kehutanan juga tampak hadir.

Herman Khaeron mengungkapkan, semua aspirasi dan pemikiran menjadi masukan yang berharga untuk menyempurnakan RUU ini. Naskah akademik (NA) sudah sangat komprehensif sebagai bahan kajian RUU P2H. NA ini juga sudah dikonsultasikan ke publik, terutama dengan kalangan akademisi dari beberapa perguruan tinggi, dinas kehutanan, dan LSM.

“Kita juga telah melakukan *public hearing* dengan para pakar di bidang kehutanan dan hukum, sehingga penyusunan dalam perspektif politik ini didasarkan pada persoalan teknis dan dasar-dasar terkait hukum,” jelas Herman. Dengan begitu, tidak ada lagi kesalahan dalam menetapkan keputusan

soal RUU ini.

Khusus menyangkut masyarakat adat sudah diatur dalam pasal 7 RUU P2H. Masyarakat adat atau tradisional diberi hak yang luas. Hutan diperuntukkan untuk 3 faktor penting, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Rahma, salah satu anggota Perkumpulan untuk Pem-

baruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, menilai RUU ini sangat tidak layak untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengertian dan pasal-pasal nya harus diperbaiki lagi bila ingin melanjutkan pembahasan RUU. (wy/mh)
foto : wahyu/parle

Sikap Menteri BUMN Soal Merpati Tak Jelas

PT. Merpati sedang mengalami dilema usaha antara hidup dan mati, antara dilikuidasi atau dihidupkan kembali. Sikap Menteri BUMN Dahlan Iskan soal Merpati ini dinilai tidak jelas dan tegas. Jawaban Menteri BUMN dalam Raker dengan Komisi VI masih belum memuaskan. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI Nasril Bahar (F-PAN) dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Senin (8/4).

“Ini mengindikasikan sikap Pak Menteri yang tidak *form* dalam penyelesaian Merpati. Kalau mau dimatikan, matikan segera. Kalau mau dihidupkan harus kita hidupkan,” tandas Nasril dalam raker. Raker sendiri dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG) dan didampingi dua Wakil Ketua Komisi VI, masing-masing Aria Bima (F-PDI Perjuangan) dan Benny K Harman (F-PD).

Komisi VI, lanjut Nasril, sudah lelah menunggu ketegasan Menteri BUMN soal Merpati. Hingga Raker digelar, belum ada kepastian menyangkut nasib Merpati, karena berimbas pada para karyawan Merpati dan kinerja Kementerian BUMN. “Nah, hari ini sikap itu kami tunggu. Karena bagaimana pun politik pembiaran yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ini, sudah cape kita menunggu sikap *form* kementerian.”

Menteri diharapkan bersikap tegas, akur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. “Merpati bukan bagian dari komoditi politik. Merpati bukan bagian dari persoalan BUMN yang berlarut-larut,” ungkap Nasril. Negara tentu tidak boleh mengalami kerugian.



Anggota Komisi VI Nasril Bahar (F-PAN).

Namun, bila negara rugi dengan harus menutup Merpati, menteri nya harus bertanggung jawab. Dan segera mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk membayar pesangon para karyawan Merpati. “Kebijakan-kebijakan ini yang kami tunggu, sehingga persoalan Merpati tidak berlarut-larut.” (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VIII Nilai Program Pendis Kemenag Belum Tersebar Merata

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Senin (8/4) terungkap bahwa Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama telah melakukan kebohongan publik, terutama kebohongan terhadap wakil rakyat. Hal tersebut diungkapkan

anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Anwar.

“Rakyat terutama yang ada dalam Dapil (daerah pemilihan) kami masing-masing dijanjikan bantuan terhadap 20 Madrasah, tetapi satu madrasah pun tidak terealisasi. Sedangkan saya mendengar ada satu TPA (Taman Pendidikan Al Quran) yang dibantu hingga 15 Miliar, sementara ada madrasah yang sudah “bulukan” malah tidak mendapat ban-

tuan. Saya berharap agar bantuan yang diberikan jangan berlatar belakang dan mengadung unsur politik. Misalnya, karena latar belakang kedekatan terhadap partai politik tertentu,” papar Syaiful.

Menanggapi pernyataan sekaligus pertanyaan Syaiful, Wakil Menteri Agama, Nassarudin Umar mengatakan bahwa dalam laporannya kepada Komisi VIII DPR RI dijelaskan capaian



program yang dijalankan seluruh direktorat di Kementerian Agama, termasuk Dirjen Pendidikan Islam. Dimana dalam laporan tersebut diketahui bahwa pada tahun 2012 Dirjen Pendis Kementerian Agama telah merehab ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 700 ruang, rehab berat ruang kelas MI sebanyak 610 unit, rehab berat ruang kelas MI-optimalisasi sebanyak 4.582 ruang, pem-

angunan perpustakaan serta bantuan peningkatan mutu madrasah lainnya, juga pembangunan laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah sebanyak 150 ruang.

Meski demikian Komisi VIII DPR RI masih menganggap program yang dijalankan Pendis tersebut belum tersebar secara merata. Untuk itu Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen Pendis Kementerian Agama untuk merumuskan program-program di Dirjen Pendis secara tepat guna. Hal tersebut menjadi salah satu *point* dalam kesimpulan raker kali ini. (Ayu) foto:ry/parle

Anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Anwar.

Andi Anzhar Duduki Kursi Presiden Committee IHL IPU

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Andi Anzhar Cakra Wijaya terpilih secara aklamasi menduduki kursi *President Committee Respect to International Humanitarians Laws of Inter-Parliamentary Union (IHL IPU)*. Andi dinobatkan menjadi presiden komite pada acara 128th IPU Assembly and Related Meetings di Quito, Ekuador beberapa waktu yang lalu.

Dalam pemilihan Presiden Komite ini, Andi berhasil menggeser calon lain, yaitu dari anggota parlemen Belgia. Dengan terpilihnya Andi menjadi Presiden Komite IHL, ia melengkapi jajaran anggota DPR yang menjabat di level eksekutif IPU, seperti Anggota Komisi I Nurhayati Ali Assegaf yang menjabat sebagai *President of Coordinating Committee of Meeting of Women Parliamentarians*, *Member of Bureau of 1st Standing Committee Peace and Security* yang dipimpin oleh Anggota Komisi I Sidarto Danusubroto, dan Anggota Komisi I Tantowi Yahya yang menjadi *Member of Advisory Group on HIV-MNCH*.

“Semula anggota parlemen Belgia menyatakan bahwa yang berhak adalah yang paling senior, karena mungkin beliau yang cukup berumur dari segi usia. Namun dari segi keanggotaan, ternyata saya juga memiliki kesempatan karena paling senior di anggota komite tersebut,” ujar Andi di sela-sela acara.

Selain Andi, Anggota Komisi X Herlini Amran juga berhasil menyabet kursi *Substitute Member dari Committee on Middle East Question*. Herlini meneruskan jabatan yang sebelumnya dijabat oleh Luthfi Hasan Ishaq, yang masa jabatannya telah habis pada Maret 2013 lalu. Dengan terpilihnya Herlini, Ketua BKSAP Surahman Hidayat menyatakan bahwa hal ini sebagai komitmen nyata Indonesia dalam menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, terkait dengan isu Palestina.

Sebagai presiden komite yang baru, Andi telah menyiapkan sejumlah amunisi rencana kerja. Ia berencana akan



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Andi Anzhar Cakra Wijaya.

melakukan kunjungan ke Yordania untuk memantau kondisi pengungsi konflik Suriah. Hal ini sejalan dengan Resolusi *Emergency Item* yang diadopsi IPU terkait Suriah, dan IHL yang erat kaitannya dengan hukum perang, isu humanitarian dalam konflik, pengungsi dan isu lainnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang juga bertindak sebagai Ketua Delegasi Indonesia menyatakan model gotong royong sebagai bagian dari prinsip pembangunan menuju kehidupan yang lebih baik. Ia menambahkan, pembangunan harus *bottom up*, namun juga diperlukan alternatif pembangunan yang tidak ‘melulu’ berkuat

dengan angka dan indeks pertumbuhan ekonomi saja.

“Kita perlu untuk seimbang antara hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dengan kelestarian lingkungan. Lagipula tidak semua tentang angka,” jelas Pramono pada sesi pleno IPU.

Selain menghadiri Sidang Umum IPU, Delegasi Indonesia juga mengikuti *Meeting of Women Parliamentarians*, *Meeting of Young Parliamentarians* dan sejumlah pertemuan subgeopolitik seperti Asia Pacific Group Meeting, ASEAN+3, dan juga *The Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)*. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

Tidak Harus Menjadi Laki-laki Untuk Menyampaikan Pandangan



Foto bersama 14 anggota Parlemen Perempuan dari beberapa negara Asia.

Visi untuk meningkatkan keterwakilan dan keikutsertaan politik perempuan di Asia Tenggara menjadi tajuk utama dalam forum regional “*Women Leadership Forum to Women Parliamentarian in Promoting Women’s Representation in Southeast Asia*” yang berlangsung di Bali, beberapa waktu yang lalu.

Forum ini dihadiri oleh 14 anggota parlemen perempuan dari Indonesia, Malaysia, Kamboja, Filipina dan Timor Leste, termasuk aktivis perempuan di parlemen, partai politik dan masyarakat sipil di Asia Tenggara. Forum yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) ini juga diselenggarakan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional.

“Kita tidak harus menjadi laki-laki untuk bisa memberikan pandangan mengenai persoalan tertentu. Kita bisa membawa perspektif kita sendiri dan memberikan warna pada setiap diskusi parlemen,” tandas Anggota

Komisi I Nurul Arifin ketika diskusi berlangsung.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IX Tetty Kadi. Ia menekankan pentingnya undang-undang yang menjabarkan hak-hak perempuan dan memastikan bahwa tidak ada hambatan formal untuk partisipasi politik perempuan pada proses pemilihan umum. Termasuk pentingnya dukungan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat keterwakilan politik perempuan dan penanganan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi perempuan.

Terkait dengan kesetaraan gender, Anggota Komisi VIII Sumarjati Arjoso menyatakan dalam melaksanakan tugas-tugas keparlemenan, anggota parlemen perempuan bukan hanya perlu menjaga kemitraan dengan anggota parlemen laki-laki, namun juga perlu untuk mengintegrasikan perspektif gender terutama dalam pembahasan terkait legislasi.

“Perempuan dapat menjelaskan mengenai konsep kesetaraan gender dan juga menunjukkan kualitas kepemimpinan perempuan, tantangan lain yang dihadapi oleh anggota parlemen perempuan adalah mencapai tujuan-tujuan *Milennium Development Goals (MDGs)* pasca 2015,” jelas Sumarjati.

Lebih lanjut, Perwakilan Anggota Parlemen dari Filipina, Emi G Calixto-Rubiano menyatakan anggota parlemen perempuan harus membangun dan memperkuat jejaring koalisi untuk kampanye-kampanye advokasi.

“Membangun jejaring dan koalisi organisasi yang terfokus dan memiliki pandangan yang sama dalam berbagai persoalan merupakan hal yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan upaya pencapaian keadilan dan reformasi sosial,” tambah Emi.

Isu lain yang menjadi pembahasan di forum ini adalah strategi inovatif untuk memenangkan pemilihan umum, praktik-praktik untuk menyuarakan agenda kebijakan di parlemen, dan strategi yang digunakan untuk membangun jaringan dukungan dan koalisi dalam memajukan masing-masing agenda kebijakan, serta kesamaan persoalan, kebutuhan dan tantangan yang perlu ditangani bersama. (sf), foto : doc/parle/hr.

Komisi VII DPR RI Akan Beri Diskresi Bagi Kabupaten Tangerang

Terkait rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang membangun tujuh pulau di utara Tangerang dimana memerlukan pasir laut yang cukup banyak, Ketua Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Tangerang, Dito Ganinduto menyatakan akan memberikan diskresi bagi Kabupaten Tangerang untuk mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

“Sekembalinya dari Tangerang, kami akan membicarakan masalah ini dengan rekan-rekan di Komisi VII DPR RI dan melaporkan situasinya di sini, mudah-mudahan bersama-sama dengan pemerintah kita akan memberikan suatu diskresi bagi Kabupaten Tangerang agar bisa mengeluarkan IUP tersebut, sehingga bisa menjalankan program yang telah direncanakan,” kata Dito disela-sela kunjungan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Tangerang, beberapa hari lalu.

Menurut Dito, sebetulnya Ijin Usaha Pertambangan belum bisa dikeluarkan karena mengenai Wilayah Pertambangannya (WP) sendiri, masih dibahas antara Komisi VII dan Pemerintah.

Tetapi, kata Dito, apabila menunggu wilayah pertambangannya selesai, itu tidak akan ada pembangunan di Indonesia.

Namun, khusus bagi bahan mineral bukan logam dan batuan, tentunya akan ada suatu dispensasi atau diskresi yang akan diberikan sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang bisa secara legal mengeluarkan IUP tersebut, kata Dito.

Persyaratan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengeluarkan suatu IUP sendiri sangat banyak dan sudah ada standarnya, imbuh Dito, tetapi ini bisa dilakukan oleh Bupati secara penunjukan langsung IUP tersebut untuk mineral bukan logam dan batuan.

Dito mengakui, bahwa semua persyaratan belum disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang kepada Komisi VII DPR RI mengenai rencana penambangan pasir laut. “Tetapi mungkin setelah pertemuan ini, Bupati Tangerang akan melengkapi

desigennya dan segala macamnya. Hanya ketika nanti kita mengajukan ke Komisi VII dalam rangka penyempurnaan ijin tambang pasirnya, ini nanti yang akan kita lengkapi lagi sebagaimana masukan-masukan dari Komisi VII pada pertemuan ini,” kata Zaki.



Ketua Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Tangerang, Dito Ganinduto berjabat tangan dengan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar.

semua kebutuhannya, nanti secara teknis berkordinasi dengan Dirjen Minerba, kemudian Dirjen Minerba akan berkoordinasi dengan Komisi VII DPR RI,” jelas Dito.

“Kita pasti mendukung secepatnya tergantung dari Bupati. Yang pasti harus sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. UU Minerba dan UU lainnya, termasuk studi lingkungannya dan amdal. Semua proses diikuti dan tidak ada yang terlewat,” paparnya.

Turut serta dalam Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Tangerang yaitu Milton Pakpahan (F-PD), Totok Daryanto (F-PAN), dan Tommy Adrian Firman (F-PPP).

Secara terpisah, Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, menyatakan bahwa dari segi teknis dan persiapan pembangunan tujuh pulau di utara Tangerang sudah siap. Tinggal perijinan-perijinannya saja yang sedang dipersiapkan.

“Secara teknis itu semua sudah ada,

Zaki menjelaskan, bahwa pembangunan ketujuh pulau tersebut akan memakan waktu sekitar tujuh sampai sembilan tahun dengan luas kurang lebih 9.000 hektar. Dana pembangunannya sendiri murni dari investor. Sudah ada dua investor yang menyatakan kesiapannya dan menyatakan komitmennya.

Untuk tahap pertama, menurut Zaki, akan dibangun empat pulau dengan luas hampir sekitar 5.000 hektar dan membutuhkan pasir lebih dari 20 juta kubik.

“Saya yakin tidak mungkin pasir di kawasan Tangerang dapat memenuhi itu. Pastinya akan kita beli dari daerah lain,” jelasnya.

“Selain jaringan jalan yang akan dibangun, kami juga menawarkan alternatif, kalau memang disetujui akan dibuatkan jaringan monorel atau kereta disana,” ujarnya.

Ketika ditanya berapa besar keuntungan yang akan diperoleh Kabupaten Tangerang, Zaki menyatakan, jika melihat laba keuntungan di ketujuh pulau, tentunya disana nanti pasti ada perijinan-perijinan yang sudah barang tentu akan menjadi PAD Kabupaten Tangerang.

“Itulah yang sebetulnya yang kita harapkan, berikutnya dari pengelolaan kawasan ke tujuh pulau. Nanti otomatis retribusi kemudian pajak-pajak akan masuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Itu sebetulnya kunci terhadap *trigger* ekonomi yang akan dibangun di sana,” tegas Zaki. (sc), foto : sc/parle/hr.

Bahas Piutang Negara, Komisi XI Undang Direksi Bank BUMN

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan pihaknya mengundang direksi Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas pengurusan piutang negara dan daerah masing-masing bank pelat merah. Agar nantinya Komisi XI dalam Panja RUU Piutang tidak salah dalam membahas piutang negara dan daerah.

“Isu penting yang dibahas bahwa piutang BUMN saat ini harus segera diselesaikan dalam pembahasan. Kami ingin mendalami apa yang dilakukan oleh direksi bank-bank BUMN soal utang yang mereka miliki sehingga masalah utang negara bisa diketahui masyarakat luas,” kata Harry saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI dengan Direksi Bank BUMN di Gedung Nusantara I, Senin (8/4).

Harry menambahkan, agenda rapat ini juga terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal piutang

bank BUMN. MK telah mengeluarkan putusan terkait uji materi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) UU No 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang mengatakan PUPN tidak lagi berwenang menagih piutang badan usaha milik negara (BUMN).

PUPN hanya berwenang menagih piutang negara, sedangkan BUMN merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah keuangan negara. Oleh karena itu, kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-piutang BUMN tunduk pada UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Namun Harry menyatakan bahwa Komisi XI hanya ingin mendengar masukan dan belum bisa mengambil keputusan untuk saat ini.

“Rapat tidak perlu ambil putusan, kami ingin mendengar masukan saja lebih khusus lagi pembahasan rencana



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.

UU,” tambah Harry.

Sejumlah Direktur Utama yang hadir diantaranya Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo dan Direktur Utama BTN Maryono. Sedangkan Bank Mandiri diwakili oleh salah satu direktornya Abdul Rahman, dan BRI diwakili Direktur Keuangan BRI Ahmad Baikuni. (sf) Foto: Od/Parle.

Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur

Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

“Kita ke lapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat,” kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Jumat (5/4/13).

Ia menekankan UU no.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

“Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih



Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) ke Kabupaten Lampung Timur.

menerbitkan izin lagi,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertanyakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

“Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didu-

kung dokumen, mesti *clear* semua,” tekannya. Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat.”

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m³ dan pasir

bangunan 1.874.000 m³. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR. (iky)



Wakil Ketua DPR Sohibil Iman berfoto bersama dengan siswa - siswi Sekolah Dasar Islam At Taqwa Rawamangun.

Sohibil Iman: Anak-anak Sudah Ikuti Perkembangan Politik

Wakil Ketua DPR Sohibil Iman menyatakan saat ini anak-anak sudah mengerti dunia politik. Menurutnya, anak-anak mengikuti perkembangan politik dari media dan memahaminya cukup baik.

“Pertanyaan dari anak-anak Sekolah Dasar ini luar biasa. Pertanyaannya bagus-bagus. Pertanyaannya di luar dugaan, seperti orang dewasa. Hal ini menggambarkan bahwa anak-anak mengikuti perkembangan melalui media,” ujar Sohibil usai menerima kunjungan Sekolah Dasar Islam At Taqwa Rawamangun, Jakarta Timur di *Operation Room* Gedung Nusantara, Rabu (10/4).

Namun, tambah Sohibil, bukan berarti apa yang diterima anak-anak melalui media semuanya benar. Sehingga Sohibil menilai kunjungan ini dapat menjadi momen agar pimpinan DPR dapat menjelaskan pemahaman politik secara baik dan benar. Selain itu, dengan adanya kunjungan ini, dapat memperkenalkan politik sejak usia dini.

“Apa yang mereka lihat di media, kadang tidak baik. Sehingga dalam momen ini saya dapat mengklarifikasi berita itu. Sehingga anak-anak dapat memiliki pemahaman politik yang baik. Sehingga mereka dapat mengambil pengalamannya, dan jika mereka nanti jadi politisi, mudah-mudahan mereka menjadi politisi yang baik pula,” jelas Sohibil.

Sohibil sangat mengapresiasi inisiatif kunjungan dari murid-murid sekolah dasar ini. Ia berharap kepada generasi mendatang dapat membuat Indonesia menjadi lebih maju.

“Mereka ini kan akan hidup di generasi mendatang, di masa yang bisa dikatakan *The Golden Age of Indonesia*. Dimana 30 tahun mendatang, Indonesia memiliki *demographic bonus*, dimana Indonesia memiliki angkatan kerja produktif yang sangat melimpah. Nah, jika mereka menjadi pemimpin di masa itu, mereka bisa memanfaatkan *demographic bonus* atau bonus penduduk yang produktif itu dengan baik dan Indonesia akan menjadi negara yang maju,” harap Sohibil. (sf) foto:ry/parle



Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII ke Lampung dipimpin Sutan Bhatoegana dan rombongan melakukan pemantauan langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah Kecamatan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Jumat (05/04), Foto : iky/parle/hr.



Ketua Tim Kunjungan Spesifik BAKN DPR RI Yahya Sacawiria menyaksikan Dirut PDAM Kota Makassar Hamzah Achmad menandatangani hasil kesimpulan rapat se usai pertemuan dengan jajaran PDAM Kota Makasar. Senin (08/04), Foto : spy/parle/hr.



Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri BUMN terkait dengan pembentukan Panja Outsourcing di Gedung Nusantara I DPR RI. Rabu (10/04), Foto : ry/iwan armanias/parle/hr.



Penandatanganan/pengesahan Draft RUU tentang Perubahan Atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kamis (11/04), Foto :Wahyu/parle/hr.

